



ISSN:
2655-6944

ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 6, No. 1, Maret 2024

Desain Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Alternatif untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Kecil: Studi kasus di Kabupaten Lombok Utara

Diswandi Diswandi^{1*}, Mansur Afifi², Busaini Busaini³, Luluk Fadliyanti⁴, Muhammad Mujahid Dakwah⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:
Pembayaran Jasa Lingkungan,
Pariwisata Berkelanjutan,
Kebijakan Lingkungan

ABSTRAK

Kegiatan pariwisata di pulau kecil seringkali lebih mengedepankan aspek keuntungan ekonomi, sementara aspek konservasi lingkungan yang menjadi dampak kegiatan pariwisata tersebut sering diabaikan karena kekurangan biaya konservasi. Jika hal ini terus terjadi, maka dalam jangka panjang taman laut di wilayah tersebut tidak akan menarik lagi, dan akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Program pembayaran jasa lingkungan (*Payment for Ecosystem Services/PES*) bisa menjadi jalan untuk mengimplementasikan upaya pengumpulan dana konservasi dari wisatawan dan pelaku usaha wisata. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kebijakan public terkait peluang penerapan program PES di Gili Matra. Penelitian ini menemukan bahwa program PES dimungkinkan untuk dikembangkan di Gili Matra melalui skema mandatori, dalam rangka mempromosikan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Keywords:

Payment for Ecosystem Services, Sustainable Tourism, Environmental Policy

ABSTRACT

The tourism industries on small islands frequently prioritize economic gains, while the environmental consequences of these activities, which include the impact on the ecosystem, are typically overlooked due to insufficient consideration of conservation costs. If this pattern persists, the marine parks in the region may eventually lose their appeal and adversely affect the tourism industry. The Payment for Ecosystem Services (PES) program offers a potential avenue for executing conservation fundraising initiatives by leveraging contributions from travelers and tourism enterprises. This study employs a qualitative methodology to analyze public policies pertaining to the implementation of the PES program in Gili Matra. The study concluded that it is feasible to establish PES (Payment for Ecosystem Services) programs on Gili Matra through mandatory initiatives, with the aim of fostering a sustainable tourism sector.

1. PENDAHULUAN

Keseimbangan dan kelestarian ekosistem daratan dan juga lautan menjadi salah satu focus utama dalam konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu sektor ekonomi yang bisa berdampak terhadap kelestarian ekosistem daratan dan lautan adalah kegiatan pariwisata khususnya pariwisata di pulau kecil. Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB terdapat kawasan destinasi wisata unggulan Gili Matra yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Daya tarik utama atraksi wisata di Gili Matra adalah keindahan taman laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Kegiatan Pariwisata bahari yang selama ini digalakkan di Gili Matra lebih menekankan pada aspek ekonomi, dimana kegiatan pariwisata ditekankan untuk memberikan dampak positif ekonomi yang maksimal. Sementara itu, aspek konservasi kurang diperhatikan sehingga kondisi terumbu karang dan biota laut lainnya yang menjadi atraksi wisata utama bisa mengalami degradasi. Jika hal ini terus terjadi, maka dalam jangka panjang taman laut di wilayah tersebut tidak akan menarik lagi, dan akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata sebagai akibat dari berkurangnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

Untuk mencegah kondisi ini, diperlukan suatu upaya untuk mengharmonisasikan antara kegiatan pariwisata dan konservasi lingkungan destinasi wisata yang bersangkutan. Dalam hal ini, kegiatan pariwisata di Gili Matra perlu diselaraskan dengan upaya-upaya konservasi, termasuk konservasi terumbu karang. Akan tetapi, kekurangan dana untuk melakukan konservasi menjadi kendala bagi tercapainya upaya tersebut. Sebagai solusi, dana konservasi bisa diperoleh melalui sumbangan sukarela maupun sumbangan wajib dari pihak yang memperoleh benefit dari aktifitas wisata yakni wisatawan dan pelaku usaha wisata. Program pembayaran jasa lingkungan (*Payment for Ecosystem Services/PES*) bisa menjadi jalan untuk mengimplementasikan upaya pengumpulan dan penyaluran dana konservasi (Wunder, 2005, 2007).

PES didefinisikan sebagai transaksi sukarela dimana jasa lingkungan yang terdefinisi dengan jelas dibeli oleh setidaknya satu pembeli jasa lingkungan dari setidaknya satu penyedia jasa lingkungan dengan syarat bahwa penyedia tersebut terus melestarikan sumber daya terkait untuk menjamin keberlangsungan jasa lingkungan tersebut (Wunder, 2005, 2007). Sementara Jasa lingkungan (*ecosystem services*) didefinisikan sebagai komponen ekologi yang menguntungkan yang dinikmati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dari ekosistem atau perlindungan lingkungan (Costanza et al., 1997).

Beberapa penelitian tentang kontribusi program PES terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai negara. Sebagai contoh Aryal (2019) merekomendasikan PES bisa menjadi sebuah pendekatan untuk membiayai pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di Nepal. Demikian juga dengan temuan Bellver-Domingo (2022) PES bisa menjadi alat untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air pada kondisi keterbatasan di bawah pendekatan circular economy. Bremer, Farley, Lopez-Carr, and Romero (2014) menemukan bahwa program PES di Ekuador telah memberikan kontribusi positif pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Allendorf and Yang (2013) di China menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *ecosystem service* bisa menjadi dasar bagi harmonisasi hubungan antara penghidupan ekonomi masyarakat dengan konservasi lingkungan hidup. Schuhmann, Casey, Horrocks, and Oxenford (2013) menganalisis kemauan membayar para penyelam (*scuba divers*) terhadap biodiversity laut di Barbados, pulau Karibia. Mereka menemukan bahwa ada suatu potensi peningkatan konservasi biota laut melalui manfaat ekonomi dari aktivitas wisata menyelam di daerah tersebut. Akan tetapi, dari literatur PES yang tersedia, belum ada yang membahas kebijakan public local untuk mendukung perumusan program tersebut.

Sehingga, penelitian ini akan berkontribusi dalam mengisi gap literature ini.

Untuk mengimplementasikan program PES, diperlukan sentuhan dari pemangku kebijakan terkait yakni dalam bentuk kebijakan public yang berupa peraturan daerah ataupun aturan lainnya yang mengatur tentang tata laksana implemmentasi PES baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Penelitian ini bertujuan mengkaji respon pemangku kebijakan terhadap peluang penerapan PES di Gili Matra, sebagai upaya untuk harmonisasi kegiatan pariwisata dan konservasi terumbu karang di perairan Gili Matra guna mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terpusat (Focus Group Discussion /FGD) dengan informan dari berbagai stakeholder pemangku kebijakan di Lombok Utara. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian yang telah disusun di atas, yakni dengan *content analysis*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon pemangku kebijakan terhadap potensi demand dan supply PES

Dari hasil wawancara mendalam dengan para pemangku kebijakan ditemukan bahwa terdapat dukungan yang kuat terhadap program pembayaran jasa lingkungan sebagai alternatif solusi untuk mencapai harmonisasi dan keseimbangan antara pencapaian manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata bahari dan konservasi sumber daya laut terutama terumbu karang.

Untuk implementasi program PES diperlukan kesepakatan antara semua stakeholder terkait. Pada saat penelitian ini dilakukan terdapat berbagai skema penarikan iuran dari wisatawan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait dengan tujuan masing-masing. Meskipun dengan jumlah yang relative

kecil, namun karena jumlah skemanya banyak, hal tersebut menjadi keluhan tersendiri dari wisatawan dan pelaku usaha wisata. Sehingga Ketika PES dilaksanakan, diharapkan tidak akan menjadi tambahan beban bagi wisatawan maupun pelaku usaha wisata. Penarikan iuran PES bisa dilakukan bersamaan dengan iuran-iuran lain yang dilakukan melalui satu platform.

Dalam hal perlindungan lingkungan hidup dari tekanan akibat aktifitas ekonomi manusia, berbagai stakeholder di Kabupaten Lombok Utara telah melakukan upaya untuk konservasi. Namun, memang ada keterbatasan dalam implementasinya. Terkait pengelolaan destinasi wisata di Gili Matra telah dilakukan optimalisasi yang bertujuan untuk mencari keseimbangan antara tamu yang datang dengan kapasitas daya dukung lahan yang tersedia sehingga tidak terjadi over capacity yang bisa berdampak pada kelestarian terumbu karang. Untuk mengontrol jumlah kunjungan wisata, sedang dikaji kebijakan *one gate system* sebagai upaya untuk memastikan berapa jumlah pengunjung dan siapa saja yang berkunjung. Terdapat sistem Visitor Management System (VMS) yang memastikan bahwa berapa capacity kawasan Gili Matra dalam menampung wisatawan yang masuk ke kawasan sehingga tidak memberikan dampak negative yang signifikan terhadap ekosistem yang ada di kawasan tersebut.

Di Kawasan wisata Gili Matra, telah diberlakukan berbagai skema tarif-tarif yang kemudian diperbaharui yang mana bagi para pelaku wisata, besarnya cukup tinggi. Namun BKKPN sebagai pengelola wilayah kelautan di Gili Matra juga punya perhitungan-perhitungan sehingga bisa memastikan terumbu karang dan lain-lainnya bisa terjaga.

Bencana Covid-19 yang memberikan dampak negative terhadap sector pariwisata yakni menyebabkan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan, namun di sisi lain membawa dampak positif bagi kelestarian terumbu karang. Dengan adanya Covid-19 selama dua tahun (2020-2022) dengan jumlah wisatawan sangat minim, tutupan terumbu karang bertambah sebesar 20%-40%, sehingga kondisi ekosistem bawah laut menjadi semakin baik. Dalam implementasi PES diperlukan

upaya inclusive supaya semua pihak terkait ikut teribat, *no one left behind*. Pemerintah daerah akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jasa lingkungan.

Payment Vehicle

Payment Vehicle merupakan media untuk melakukan penarikan dana jasa lingkungan yang dibayarkan oleh wisatawan dan pelaku usaha wisata. Khusus untuk wisatawan, media pembayaran bisa berupa tiket masuk. Pada setiap tiket masuk yang diberlakukan kepada wisatawan, telah terkandung juga dana jasa lingkungan sesuai besaran yang telah ditentukan. Namun yang harus dipastikan adalah tiket masuk itu ditujukan bagi wisatawan yang datang untuk berwisata di kawasan Gili Matra. Sebagaimana temuan Diswandi dkk (2020), dimana wisatawan akan mau membayar jika peruntukan dana jelas dan dikelola secara transparan.

Untuk menghindari kebocoran, perlu digunakan system pembayaran digital misalnya menggunakan QR Code tertentu seperti QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Implementasi Teori PES

Terkait dengan implementasi teori PES, apakah akan menerapkan teori Coase (Coase, 1960) yang berbasiskan skema sukarela ataukah teori Pigou (Pigou, 1932) yang berbasiskan skema mandatori, pemangku kebijakan di Lombok Utara merespon bahwa Pemerintah daerah lebih mengutamakan skema mandatori karena jika menggunakan skema sukarela, pemerintah tidak akan bisa memaksakan orang untuk membayar. Sebenarnya bisa juga diaplikasikan skema hybrid sebagaimana praktik PES di Lombok Barat (Diswandi, 2017).

Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan, diperlukan kesadaran dari pihak pelaku usaha wisata bahwa perlu adanya pembatasan kapasitas untuk menyesuaikan dengan daya dukung lahan. Hal ini untuk menghindari jangan sampai Gili Matra sebagai kawasan andalan Lombok Utara dan NTB punya umur yang pendek, akibat *over capacity* terkait dengan eksploitasi kawasan pariwisata tersebut. Pemerintah Daerah mulai menekankan bahwa kegiatan wisata di Gili Matra tidak hanya

mengejar pariwisata dengan kuantitas, tetapi tetap menonjolkan dan menjaga kualitas sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Program pembayaran jasa lingkungan (PES) dimungkinkan untuk dikembangkan di Gili Matra dalam rangka mempromosikan industri pariwisata yang berkelanjutan. Penerapan program PES bisa dilakukan melalui skema mandatori yakni melalui peraturan daerah yang mewajibkan setiap wisatawan dan/atau pelaku usaha wisata untuk berkontribusi dalam upaya konservasi terumbu karang. Sebagai *payment vehicle*, pembayaran disarankan untuk disertakan dalam tiket masuk menggunakan satu platform digital untuk menghindari kebocoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Allendorf, T. D., & Yang, J. (2013). The role of ecosystem services in park–people relationships: The case of Gaoligongshan Nature Reserve in southwest China. *Biological Conservation*, 167(0), 187-193. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2013.08.013>
- Aryal, K., Bhatta, L. D., Thapa, P. S., Ranabhat, S., Neupane, N., Joshi, J., ... & Shrestha, A. B. (2019). Payment for ecosystem services: Could it be sustainable financing mechanism for watershed services in Nepal. *Green Finance*, 1(3), 221-236.
- Bellver-Domingo, Á., & Hernández-Sancho, F. (2022). Circular economy and payment for ecosystem services: A framework proposal based on water reuse. *Journal of Environmental Management*, 305, 114416.
- Bremer, L. L., Farley, K. A., Lopez-Carr, D., & Romero, J. (2014). Conservation and livelihood outcomes of payment for ecosystem services in the Ecuadorian Andes: What is the potential for ‘win–win’? *Ecosystem Services*, 8(0), 148-165. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.03.007>

- Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1-44.
- Costanza, R., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., Van Den Belt, M., D'Arge, R., . . . O'Neill, R. V. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253-260. doi:10.1038/387253a0
- Diswandi, D. (2017). A hybrid Coasean and Pigouvian approach to Payment for Ecosystem Services Program in West Lombok: Does it contribute to poverty alleviation? *Ecosystem Services*, 23, 138-145. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.005>
- Diswandi, D., Afifi, M., Fadliyanti, L., & Hailuddin, H. (2021, May). Tourism enterprises' willingness to contribute to payment for ecosystem services (PES) program in Gili Matra, Indonesia. In *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)* (pp. 418-421). Atlantis Press.
- Pigou, A. C. (1932). *The economics of welfare*. London: Palgrave Macmillan.
- Schuhmann, P. W., Casey, J. F., Horrocks, J. A., & Oxenford, H. A. (2013). Recreational SCUBA divers' willingness to pay for marine biodiversity in Barbados. *Journal of environmental management*, 121(0), 29-36. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.02.019>
- Wunder, S. (2005). *Payment For Environmental Services : some nuts and bolts*. CIFOR Occasional Paper No. 42.
- Wunder, S. (2007). The Efficiency of Payments for Environmental Services in Tropical Conservation. *CONSERVATION BIOLOGY*, 21(1), 48-58. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00559.x